

LEMBARAN DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 1

5 Juni

1965

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
JAWA BARAT

Tanggal : 11 Maret 1965.
Nomor: 38/B.I/Pem/Sk/65.
Perihal : Penyerahan pengelolaan urusan perikanan
dari Waduk Darma kepada Daerah Tk. II
Kuningan.

GUBERNUR KEPALA DAERAH JAWA BARAT.

Menimbang :

1. Bahwa dalam pembangunan semesta, termasuk mempertinggi hasil ikan harus diadakan usaha sehebat-hebatnya, demi tercapainya tujuan masyarakat yang adil dan makmur;
2. Bahwa perairan umum seperti Waduk Darma yang terletak di Daerah Tingkat II Kuningan, adalah merupakan sumber penghasil ikan yang penting;
3. Bahwa untuk mencapai hasil ikan yang setinggi-tingginya dari Waduk tersebut perlu diadakan usaha pengelolaan urusan perikanan yang sebaik-baiknya;
4. Bahwa usaha pengelolaan urusan perikanan yang dimaksud pada angka 3 diatas dipandang perlu untuk diselenggarakan oleh Daerah Tingkat II Kuningan;

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 1 tahun 1957 jo. Penpres No. 6 tahun 1959 (disempurnakan);
2. Pasal 2 Peraturan Daerah Propinsi Jawa-Barat tentang penangkapan ikan dari perairan umum dalam Daerah Tingkat I Jawa-Barat (Berita Propinsi tanggal 31 Desember 1955 No. 7), jo. surat keputusan D.P.D. Propinsi Jawa-Barat tanggal 24 April 1956 No. 5/25-B/SDPD/SK/56 (Berita Propinsi tanggal 30 Juni 1956 No. 4);
3. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa-Barat No. 14/PD.DPRD-GR/61 tertanggal 17 April 1961 tentang "Penyerahan urusan-urusan dalam bidang perikanan darat kepada Daerah Tingkat II/Kotapraja diseluruh Jawa-Barat (Lembaran Daerah tanggal 20 Desember 1961 No. 7/61);
4. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa-Barat tanggal 26 Juni 1962 13/PD/DPRD-GR/62 tentang penyerahan pengawasan penangkapan ikan dari perairan umum dalam wilayah Jawa-Barat kepada Daerah Tingkat II.

MEMUTUSKAN :

PERTAMA :

Sambil menunggu adanya kepastian dari Pemerintah Pusat mengenai status dan pengusaha (exploitasi) dari proyek Waduk Darma yang sedang dibangun, menyerahkan untuk sementara pengelolaan urusan

1. J.M. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. J.M. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga di Jakarta.
3. J.M. Menko Pertanian di Jakarta.
4. J.M. Menteri Menteri Urusan Perencanaan Pembangunan Nasional di

Jakarta.

5. Kepala Jawatan Perikanan Darat Daerah Tingkat I Jawa-Barat di Bandung.
6. Kepala Jawatan Pekerjaan Umum Daerah Tingkat I Jawa-Barat di Bandung.
7. Kepala Jawatan Pertanian Rakyat Daerah Tingkat I Jawa-Barat di Bandung.
8. Residen/Pembantu Penghubung Gubernur Kepala Daerah di Cirebon.
9. Para Bupati Kepala Daerah Tingkat II di Cirebon, Kuningan, Indramayu dan Majalengka.
10. Kepala Jawatan Pekerjaan Umum Daerah Tingkat I Jawa-Barat Seksi Cirebon/Kuningan.
11. Kepala Jawatan Perikanan Darat Wilayah Kabupaten Kuningan.
12. Para Kepala Biro/Inspektorat/Bagian pada Sekretaris Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa-Barat di Bandung.